

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(P U P R)
KABUPATEN BELU



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-NYA, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu 2024 disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

Atambua, 09 Januari 2025

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu,

S. VINSEN DALUNG, ST

NIP. 19760820 200212 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

RINGKASAN EKSEKUTIF..... v

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1. Struktur Organisasi 1

 1.2. Fungsi dan Tugas 3

 1.3. Keadaan Pegawai..... 7

 1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana 9

 1.5. Keuangan 11

 1.6. Sistimatika LKIP 12

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 13

 2.1. Perencanaan Strategis 13

 2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja..... 13

 2.1.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan..... 13

 2.2. Perjanjian Kinerja..... 27

 2.3. Rencana Anggaran Tahun Berjalan 27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 32

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 32

 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 45

 3.3. Realisasi Anggaran 49

BAB IV. PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....8

Tabel 1.2 Daftar Aset Dinas PUPR Kabupaten Belu.....9

Tabel 1.3 Anggaran Dinas PUPR 202311

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR 2021-202613

Tabel 2.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan14

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....27

Tabel 2.4 Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran.....28

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja.....32

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 202235

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Berada dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 202236

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Nasional.....38

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 202238

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2022 dengan Tahun 202142

Tabel 3.7 Perbandingan Alokasi DAK Jalan T.A 2021-202344

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Anggaran.....49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR
Kabupaten Belu Berdasarkan Peraturan Bupati Belu
Nomor 54 Tahun 2019.....2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Belu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja kepada Bapak Bupati Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2021-2026. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, menetapkan tujuan peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian. Adapun sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya infrastruktur dasar. Selanjutnya indikator yang diukur adalah sebagai berikut;

No	Indikator	Target 2024
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	66,23 %
2	Rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak	35,48 %
3	Rumah tinggal bersanitasi layak	40,72 %
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	69,33 %
5	Rasio jaringan irigasi	20,52 %
6	Persentase dokumen rencana rinci yang sah	14,29 %

Capaian terhadap indikator-indikator tersebut di tahun 2024, rata-rata melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh target yang ditentukan masih sama dengan keadaan awal. Walaupun pada tahun 2024 capaian indikator masuk dalam kategori memuaskan, bukan berarti semuanya berjalan secara lancar. Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu:

1. Kurangnya potensi air baku untuk penyediaan air minum;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun;
3. Permasalahan sosial dan budaya terkait kepemilikan lahan untuk pembangunan infrastruktur;
4. Kurang optimalnya penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Terhadap kendala-kendala tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil

1. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi-potensi sumber air yang ada di Kabupaten Belu.
2. Membangun koordinasi bersama pihak-pihak kecamatan, kelurahan dan desa beserta perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan infrastruktur yang telah dibangun;
3. Melakukan pendataan dan menginventarisasi terhadap tanah-tanah milik Pemerintah Daerah Belu;
4. Membuat proposal dan perencanaan pembangunan dan membangun komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Belu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, sedangkan tata kerja pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

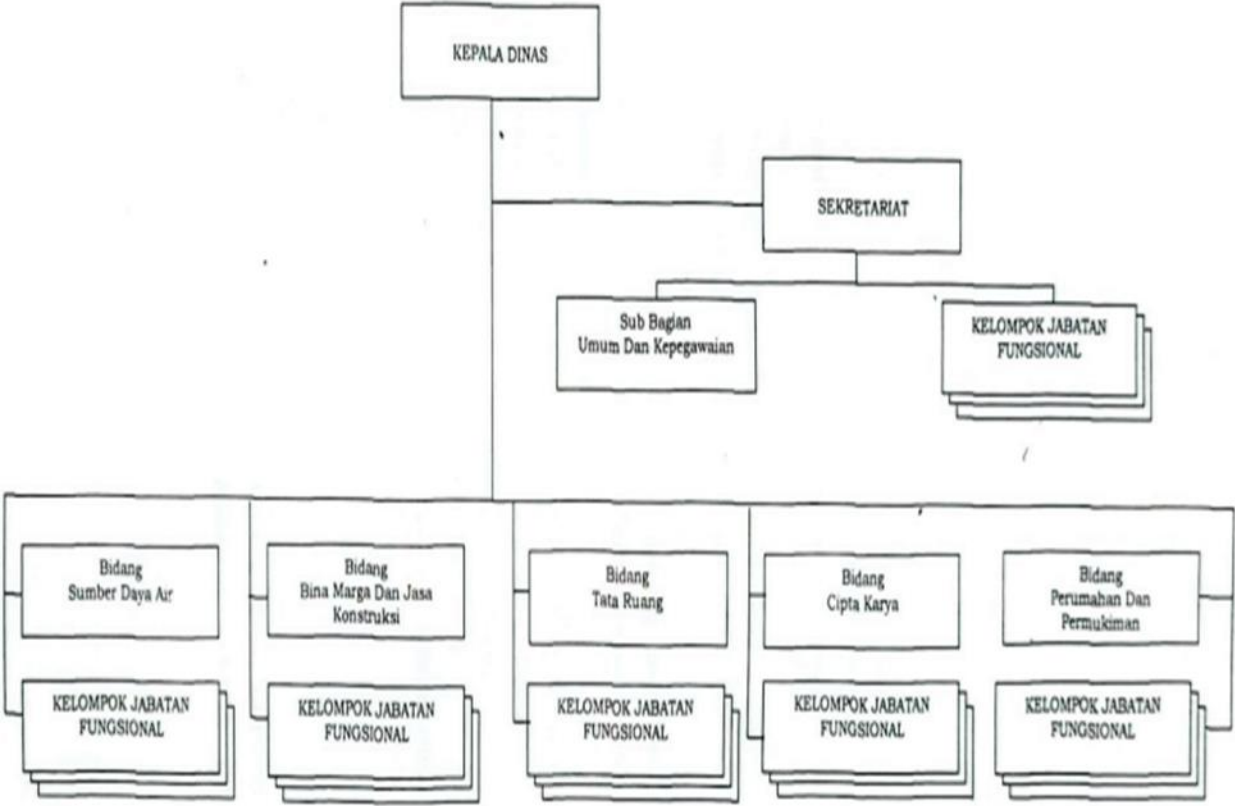
Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahi;
4. Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
5. Bidang Tata Ruang
6. Bidang Cipta Karya
7. Bidang Perumahan dan Permukiman
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT. Walaupun terdapat dalam struktur organisasi, hingga saat ini belum ada UPT yang terbentuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

Gambaran struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditampilkan dalam gambar 1.1 berikut ini;

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kab. Belu
Berdasarkan Peraturan Bupati Belu No. 50 Tahun 2022



1.2 Fungsi dan Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan runag dan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan runag dan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan runag dan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun penjabaran tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1) Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan runag dan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

2) Fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

B. Sekretaris

1) Tugas :

Melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan

perundangan, pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggaan kantor.

2) Fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
3. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan langkah – langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menghimpun dan mengelola data pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja pokja area perubahan reformasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan daftar urut kepangkatan, pengusulan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan dan Taspen agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul penganakatan jabatan dalam struktural, pensiun, cuti dan modal C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan sasaran kerja pegawai agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat

waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;

9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
10. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip inaktif sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
14. Memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
16. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Membimbing bawahan dalam melaksanakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, profesional , beretika dan bermoral; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang dibereikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Kepala bidang Sumber Daya Air

Fungsi :

1. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

D. Kepala Bidang Bina Marga Dan Jasa Konstruksi

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan terkait jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
2. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
3. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
4. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
5. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah jasa konstruksi;
6. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
7. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang – undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan konstruksi;
8. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
9. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
10. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
11. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
12. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (nol kecil dan kecil) di wilayah kabupaten; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

E. Kepala Bidang Tata Ruang

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan penataan ruang;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
5. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Cipta Karya

Fungsi :

1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
2. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
3. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;

4. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
5. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
6. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Fungsi :

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Keadaan Pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu saat ini memiliki sumber daya manusia berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel. 1.1
Keadaan pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan,
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

*) JUMLAH ASN MENURUT
GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		KET. JLH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	IV/b	1	-	1
2	IV/a	4	-	4
3	III/d	9	2	11
4	III/c	3	-	3
5	III/b	7	1	8
6	III/a	8	6	14
7	II/d	5	-	5
8	II/c	10	-	10
9	II/b	2	-	2
10	II/a	4	-	4
11	I/d	2	-	2
12	I/c	2	-	2
13	IX	5	3	8
Jumlah		62	12	74

*)JUMLAH ASN MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	
1	2	3	4	5
1	S2	1	0	1
2	S1	30	8	38
3	D3	4	-	4
4	SMA/Setara	20	4	24
5	SMP/Setara	1	0	1
6	SD/Setara	6	0	12
Jumlah		62	12	74

*)JUMLAH ASN MENURUT AGAMA

NO.	AGAMA	JENIS KELAMIN		KET. JLH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	KATOLIK	53	11	64
2	PROTESTAN	7	1	8
3	ISLAM	2	-	2
JUMLAH				74

*)JUMLAH ASN MENURUT
ESELONERING

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		KET. JLH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	II	1	-	1
2	III-B	5	-	5
3	IV-A	8	1	9
JUMLAH				15

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		KET. JLH
		L	P	
1	2	3	4	5
1	IV	5	-	5
3	III	27	9	36
4	II	21	-	21
5	I	4	-	4
6	IX	5	3	8
JUMLAH				74

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh sumber daya manusia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Belu juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut;

Tabel 1.2
Daftar Aset Dinas PUPR Kab. Belu

NO	NAMA BARANG		JUMLAH	SAT	KONDISI	KET.
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		50470	M ²		
2	Alat - alat Berat					
	-	Mobil Tronton (Isuzu)	1	Unit	Baik	
	-	Vibrotory Roller	1	Unit	Baik	
	-	Walls 2,5 Ton	1	Unit	Baik	
	-	TWR 14 Ton	1	Unit	Baik	
	-	Motor Greder (Baru)	1	Unit	Baik	
	-	Exavator (Baru)	1	Unit	Baik	
3	Alat - alat Angkutan					
	-	Kendaraan Roda Eman	10	Unit	Baik	
	-	Kendaraan Roda Empat	8	Unit	Baik	
	-	Kendaraan Roda Dua	32	Unit	Baik	
4	Alat Bengkel dan alat Ukur					
	-	GPS	3	Unit	Baik	
5	Alat - alat Kantor Rumah Tangga					
	-	Meja Biro	21	Unit	Baik	
	-	Meja Kerja Biro	20	Unit	Baik	
	-	Meja Tamu	1	Unit	Baik	
	-	Meja 1/2 Biro	44	Unit	Baik	
	-	Meja Kayu/Rotan	1	Unit	Baik	
	-	Meja Kerja	12	Unit	Baik	
	-	Meja Rapat	2	Unit	Baik	
	-	Kursi Kerja	1	Unit	Baik	
	-	Kursi Rapat Besi	34	Unit	Baik	
	-	Sofa 1 set	2	Unit	Baik	
	-	Kursi Kerja (Roda)	7	Unit	Baik	
	-	Kursi Kerja	34	Unit	Baik	
	-	Kursi Plastik	38	Unit	Baik	
	-	Kursi Kayu	13	Unit	Baik	
	-	Kursi Kerja Putar	2	Unit	Baik	
	-	Kursi Spon Merah	5	Unit	Baik	
	-	Kursi Besi Lipat	10	Unit	Baik	
	-	Kursi Tamu Panjang	2	Unit	Baik	
	-	Lemari Arsip	36	Unit	Baik	
	-	Laptop	22	Unit	Baik	
	-	Komputer	5	Unit	Baik	
	-	Wireless	1	Unit	Baik	

NO	NAMA BARANG		JUMLAH	SAT	KONDISI	KET.
	-	Printer Laserjet	1	Unit	Baik	
	-	Printer Epson	5	Unit	Baik	
	-	Printer Cannon	7	Unit	Baik	
	-	Brankas	1	Unit	Baik	
	-	Branks Arsip	1	Unit	Baik	
	-	Rak Arsip	6	Unit	Baik	
	-	Filling Kabinet	2	Unit	Baik	
	-	LCD	1	Unit	Baik	
	-	Printer Mini	1	Unit	Kurang Baik	
	-	Printer Pixa	3	Unit	Baik	
	-	Mesin Absensi	2	Unit	Baik	
6	Alat - alat Studio dan Komunikasi					
	-	Drone	1	Unit	Baik	
	-	Camera	1	Unit	Kurang Baik	
	-	Faximile	3	Unit	Kurang Baik	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen		3750	M ²		

1.5 Keuangan

Pada tahun 2024, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR 2024 total anggaran yang dikelola pada Dinas PUPR adalah Rp 121.129.321.846,00 (Seratus Dua Puluh Satu Miliard Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.3 berikut;

Tabel 1.3
Anggaran Dinas PUPR Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	7.550.538.849
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.815.974.602
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.694.077.442
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	201.909.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.374.138.962
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.000.000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79.640.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.538.539.760
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	723.885.000
10	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	468.100.000
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	325.750.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	25.000.000
T O T A L		98.897.553.615

1.6 Sistematika LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Struktur Organisasi
- I.2 Fungsi dan Tugas
- I.3 Keadaaan Pegawai
- I.4 Keadaan sarana dan Prasarana
- I.5 Keuangan
- I.6 Sistematika LkjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Perencanaan Strategis
 - II.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
 - II.1.2 Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan
- II.2 Perjanjian Kinerja
- II.3 Rencana Anggaran Tahun Berjalan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
- III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- III.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- IV.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
- IV.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR sebagaimana terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas PUPR 2021-2026 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas PUPR 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan prbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	60,60	61,99	63,40	66,23	67,07	69,07
			Rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak	30,20	31,96	33,72	35,48	39,01	39,01
			Rumah tinggal bersanitasi layak	37,89	38,83	39,78	40,72	41,66	42,60
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	68,78	68,96	69,14	69,33	69,51	69,69
			Rasio jaringan irigasi	16,15	18,53	19,30	20,52	21,94	22,68
			Persentase dokumen rencana rinci yang sah	0	0	14,29	14,29	28,57	42,86

2.1.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Berikut ini adalah gambaran rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu sebagaimana terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 – 2026.

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22
Mewujudkan good governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.0 3.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Predi kat/ Angk a	CC/51,5	CC/51,5	9.374.902.675,00	CC/52	9.521.122.991,00	CC/54	9.670.205.158,00	CC/56	9.822.206.288,00	CC/58	9.977.184.634,00	B/60	10.135.199.616,00	B/60	58.500.821.362,00	Sekretariat	Atambua
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayar	Oran g	83,00	83,00	7.212.976.793,00	83,00	7.359.197.109,00	83,00	7.459.197.109,00	83,00	7.544.197.109,00	83,00	7.644.197.109,00	83,00	7.744.197.109,00	83,00	44.963.962.338,00	Sekretariat	Atambua
			- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bula n	12,00	12,00	32.500.000	12,00	32.500.000	12,00	35.000.000	12,00	45.000.000	12,00	50.000.000	12,00	65.000.000	12,00	260.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Atambua
			- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bula n	12,00	12,00	430.565.000	12,00	430.565.000	12,00	456.008.049	12,00	478.009.179	12,00	482.987.525	12,00	496.002.507	12,00	2.774.137.260,00	Sekretariat	Atambua

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang di Sediakan	Unit	20,00	20,00	67.545.700	20,00	67.545.700	20,00	70.000.000	20,00	75.000.000	20,00	80.000.000	20,00	90.000.000	20,00	450.091.400,00	Sekretariat	Atambua
			- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Bula n	12,00	12,00	133.948.200	12,00	133.948.200	12,00	150.000.000	12,00	160.000.000	12,00	170.000.000	12,00	180.000.000	12,00	927.896.400,00	Sekretariat	Atambua
			- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	100,00	100,00	997.366.982	100,00	997.366.982	105,00	1.000.000.000	107,00	1.020.000.000	109,00	1.050.000.000	110,00	1.060.000.000	110,00	6.124.733.964,00	Sekretariat	Atambua

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Doku men	29,00	30,00	500.000.000	29,00	500.000.000	29,00	500.000.000	29,00	500.000.000	29,00	500.000.000	29,00	500.000.000	29,00	3.000.000.000,00	Sekretariat	Atambua
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 03. 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	Pers en	16,15		4.510.679.950	18,53	4.519.701.310	19,30	4.528.740.713	20,52	4.537.798.194	21,94	5.546.873.790	22,68	6.555.967.538	22,68	30.199.761.495,00	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Belu
			- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang di Bangun dan di Tingkatkan	Mete r	2.000	2.000	2.480.873.973	2.000	2.485.835.721	2.000	2.037.933.321	2.000	2.495.789.007	2.000	3.328.124.274	2.000	3.933.580.523	10.000	10000000000000000#		Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pengelolaan SDA Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai dalam Kab. Belu	Unit	64	64	2.029.805.978	70,00	2.033.865.590	80,00	2.490.807.392	90,00	2.042.009.187	100,00	2.218.749.516	110,00	2.622.387.015	110,00	1000000000000000		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 03. 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Keluarga dengan Akses terhadap Air minum Layak	Pers en	30,20	30,20	6145967016,00	31,96	6.158.258.950	33,72	6.170.575.468	35,48	6.182.916.619	37,24	10.195.282.452	39,01	11.207.673.017	39,01	9000000000000000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Belu
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani SPAM Perpipaan Layak	RT	17615,00	1700,00	6145967016,00	190990 900	6.158.258.950	19600	6.170.575.468	20600	6.182.916.619	22000	10.195.282.452	25000	11.207.673.017	25000	1230098877770		Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan	Persen	33,33	33,33	.	33,33	600.000.000	66,67	600.000.000,00	66,67	600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Belu
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang di Sediakan	Unit	20,00	20,00	25	25,00	600.000.000	30,00	600.000.000	35,00	600.000.000,00	40,00	1.600.000.000,00	45,00	2.600.000.000,00	45,00	6.000.000.025,00		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persen	37,89	37,89	3.608.686.056	38,83	3.615.903.428	39,78	3.623.135.235	40,72	3.630.381.505	41,66	3.637.642.268	42,60	4.644.917.553	42,60	22.760.666.045,00	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Belu
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persen	37,89	37,89	3.608.686.056	38,83	3.615.903.428	39,78	3.623.135.235	40,72	3.630.381.505	41,66	3.637.642.268	42,60	4.644.917.553	42,60	22.760.666.045,00		Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periade Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya terjadi genangan>2 kali setahun	Pers en	35,89	35,89	2.013.812.000	36,84	2.017.839.624,00	37,78	2.021.875.303,00	38,79	2.025.919.054,00	39,85	2.529.970.892,00	40,91	1.034.030.834,00	40,91	11.643.447.707,00	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Belu
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya terjadi genangan>2 kali setahun	Pers en	35,89	35,89	2.013.812.000	36,84	2.017.839.624,00	37,78	2.021.875.303,00	38,79	2.025.919.054,00	39,85	2.529.970.892,00	40,91	1.034.030.834,00	40,91	11.643.447.707		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	Pers en	0	0	215.050.000	20,00	215.480.100,00	40,00	215.911.060,00	60,00	216.342.882,00	80,00	216.775.568,00	100,00	217.209.119,00	100,00	1.296.768.729,00	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelengga raan Bangunan Gedung, Pemberian IMB dan SLF	Pers en	0	0	215.050.000	20,00	215.480.100,00	40,00	215.911.060,00	60,00	216.342.882,00	80,00	216.775.568,00	100,00	217.209.119,00	100,00	1.296.768.729,00		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 03. 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Pers en	60,6	60,6	31.062.915.197	61,99	31.125.041.027,00	63,40	31.187.291.109,00	66,23	31.249.665.692,00	67,65	32.312.165.023,00	69,07	35.374.789.353,00	69,07	192.311.867.401,00	Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi	Kabupaten Belu
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Km	213.820	213.820	31.062.915.197	218,00	31.125.041.027,00	223,50	31.187.291.109,00	227,00	31.249.665.692,00	230,00	32.312.165.023,00	250,00	35.374.789.353,00		192.311.367.401		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 03. 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Tukang	Pers en	0	0	0	20,00	100.000.000,00	40,00	100.000.000,00	60,00	100.000.000,00	80,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	700.000.000,00	Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi	Atambua

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan				yang Bersertifikasi																		
			- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan	Kali	0	0	0	1,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	4,00	200.000.000,00	5,00	200.000.000,00	5,00	700.000.000,00		Atambua
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci	Persen	0	0	229.279.308	0	229.737.866	14,29	230.197.342	14,29	230.657.737	28,57	231.119.052	42,86	231.581.290	42,86	1.382.572.595,00	Bidang Tata Ruang	Atambua

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periade Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Rinci Kabupaten yang di Tetapkan		0,00	0	109.279.308	1	109.737.866	1,00	110.197.342	2,00	110.657.737	2,00	111.119.052	3,00	111.581.290	3,00	1.302.572.595		Atambua
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang di Lakukan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Kali	-	0	40.000.000	2	40.000.000	4,00	40.000.000	6,00	40.000.000	8,00	40.000.000	10,00	40.000.000	10,00	240.000.000,00		Atambua
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sitem Informasi Pemanfaatan Ruang yang di sediakan	Unit	2	2	40.000.000	3	40.000.000	5,00	40.000.000	7,00	40.000.000	9,00	40.000.000	12,00	40.000.000	12,00	240.0000.000,00		Atambua
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pengedalian Pemanfaatan Ruang yang di Susun	Doku men	0	0	40.000.000	1	40.000.000	2,00	40.000.000	2,00	40.000.000	3,00	40.000.000	3,00	40.000.000	3,00	240.000.000,00		Atambua

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periade Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Kekersediaan Rumah Layak Huni	Persen	68,78	68,78	2.019.102.493	68,96	2.023.140.697	69,14	2.027.186.979	69,33	2.031.241.353	69,51	4.035.303.836	69,69	5.043.374.443	69,69	17.179.349.801,00	Bidang Perumahan & Permukiman	Kabupaten Belu
			- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Unit	0	0	200.000.000	50,00	200.000.000	100,00	650.000.000	150,00	200.000.000	200,00	500.000.000	250,00	600.000.000	250,00	2.350.000.000,00		Kabupaten Belu
			- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terdampar Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1.819.102.493		1.823.140.697,00		1.377.186.979,00		1.831.241.353,00		3.535.303.836,00		4.443.374.443,00		2.350.000.000		Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.04.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Kekersediaan Rumah Layak Huni	Pers en	67,78	67,78	244.250.000	68,96	244.738.500,00	69,14	245.227.977,00	69,33	245.718.433,00	69,51	246.209.870,00	69,69	1.090.763.971,00	69,69	2.316.908.751,00	Bidang Perumahan & Permukiman	Kabupaten Belu
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	Kali	0	12	244.250.000	12,00	244.738.500,00	12,00	245.227.977,00	12,00	245.718.433,00	12,00	246.209.870,00	12,00	1.090.763.971,00	12,00	2.316.908.751,00		Kabupaten Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01.04.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan	Pers en Pers il	0 0	0 0	 2.200.000.000,00	20,00 5,00	 2.200.000.000,00	40,00 10,00	 500.000.000,00	60,00 15,00	 500.000.000,00	80,00 20,00	 500.000.000,00	100,00 25,00	 500.000.000,00	100,00 25,00	4.200.000.000,00	Bidang Perumahan & Permukiman	Kabupaten Belu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periade Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemenuhan Persil Tanah untuk Pembanguna n	Persi l	0	0		5,00	2.200.000.000,00	10,00	500.000.000,00	15,00	500.000.000,00	20,00	500.000.000,00	25,00	500.000.000,00	25,00	4.200.000.000,00		Kab. Belu
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 04. 05	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang Teridentifika si	Pers en	0	0	100.000.000	20,00	100.000.000	40,00	100.000.000	60,00	100.000.000	80,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100	600.000.000	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Belu
					Pers il	0	0		10,00		20,00	30,00	40,00	50,00	50							
			- Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persil Tanah Ulayat yang ditetapkan	Persi l	0	0	100.000.000	10,00	100.000.000	20,00	100.000.000	30,00	100.000.000	40,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50	600.000.000		
Mewujudkan Peningkatan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya infrastruktur dasar	01. 04. 05	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikata n Tanah Aset Pemda	Pers en	20,96	20,96	200.000.000	24,26	200.000.000	27,56	200.000.000	30,86	200.000.000	34,16	200.000.000	37,46	200.000.000		1.200.000.000	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kabupaten Belu
					Bida ng	127	127		147,00		167,00	187,00	207,00	227,00	227							

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			- Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang Disertifikat	Bida ng	127	127	100.000.000	147,00	100.000.000	167,00	100.000.000	187,00	100.000.000	207,00	100.000.000	227,00	100.000.000	227	600.000.000		Kabupaten Belu
			- Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang Disertifikat	Bida ng	127	127	100.000.000	147,00	100.000.000	167,00	100.000.000	187,00	100.000.000	207,00	100.000.000	227,00	10.000.000	227	510.000.000		Kabupaten Belu

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Perjanjian kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan. Berikut penjabaran perjanjian kinerja berdasarkan Sasaran, Indikator dan target.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	66,23%
		Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	35,48%
		Rumah tangga bersanitasi layak	40,72%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	69,33%
		Rasio jaringan irigasi	20,52%
		Persentase dokumen rencana rinci yang sah	28,57%

Namun sesuai dengan Profiling SAKIP Kabupaten Belu Tahun 2024 oleh Kementerian PAN RB RI terdapat beberapa catatan terutama belum adanya kesesuaian antara rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja maka akan dilakukan penyeselarasan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang lebih SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*) yang akan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan evaluasi Kemenpan RB.

2.3 Rencana Anggaran Tahun Berjalan

Rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.4
Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.573.600.150,00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.762.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	260.162.000,00
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	162.600.000,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.150.838.150,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.967.000.000,00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.633.000.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	356.188.150,00
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	38.625.000,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	156.025.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.719.682.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.719.682.000,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	25.950.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	307.298.000,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.507.550.000,00
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.648.836.000,00
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.230.048.000,00
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	201.909.000,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	201.909.000,00

	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	201.909.000,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.992.992.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.992.992.000,00
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20.000.000,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.972.992.000,00
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79.640.000,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	79.640.000,00
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	29.640.000,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50.000.000,00
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70.862.516.780,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	70.862.516.780,00
	Penggantian Jembatan	4.725.000.000,00
	Pembangunan Jalan	63.746.053.000,00
	Rehabilitasi Jalan	2.391.463.780,00
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	169.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	169.000.000,00
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	169.000.000,00
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.202.816.322,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.400.000,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.400.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.133.919.852,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.077.723.552,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.196.300,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.640.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.640.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.003.350,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.405.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.400.100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.072.250,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.731.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.995.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.400.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.810.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.810.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.891.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.496.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.395.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.152.120,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	491.230.300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	126.921.820,00
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	902.585.000,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	28.700.000,00

	Program Kabupaten/Kota	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.700.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	873.885.000,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	440.125.000,00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	433.760.000,00
X	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	138.990.000,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	138.990.000,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	138.990.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	310.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	155.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah yang di buat sesuai Perjanjian Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu selaku penyelenggara urusan di Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan memenuhi kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Belu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi Bupati Belu .

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
1. Realisasi Indikator Kinerja

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sat.	Target 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	%	66,23	40,32	60,88
		2	Rumah Tangga dengan	%	35,48	34,20	98,37

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sat.	Target 2024	Realisasi	Capaian
			akses terhadap air minum layak				
		3	Rumah tangga bersanitasi layak	%	40,72	80,86	202,78
		4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	69,33	64,82	93,49
		5	Rasio jaringan irigasi	%	20,52	28,42	138,50
		6	Jumlah dokumen rencana rinci yang sah	%	14,29	14,29	50,02

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator sasaran yang capaian kinerjanya melampaui target yang direncanakan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) yang ditargetkan 63,40% pada tahun 2024 mampu direalisasikan 40,32%. Menurunnya capaian indikator ini disebabkan oleh adanya pergantian ruas jalan sebagaimana terdapat Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 16/600.1/PUPR/V/2024 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Belu. Dengan adanya pergantian ruas-ruas jalan tersebut, kondisi jalan yang terdapat SK dimaksud mempengaruhi capaian indikator ini.

Capaian Rasio jaringan irigasi pada tahun adalah 28,42%. Melampaui target yang ditetapkan; 20,52%. Konsistensi dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi merupakan penentu utama dalam capaian ini. Pada tahun 2024, DAK Bidang Irigasi Kabupaten Belu adalah Rp3.510.000.000 (*Tiga Miliard Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*). Hingga tahun 2024, panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik di Kabupaten Belu adalah 25.206,30 Meter.

Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak belum mencapai target yang diharapkan. Target 35,48% yang direncanakan hanya dapat dicapai pada angka 34,90 persen. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya akses rumah tangga terhadap air minum layak ini antara lain; belum optimalnya penganggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, ketersediaan air baku yang terbatas karena keadaan geografi dan topografi, mayoritas keberadaan air baku berstatus milik masyarakat adat bukan milik pemerintah, belum adanya lembaga pengelola air bersih non BUMD

(kelompok masyarakat) yang handal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas air minum umum yang telah dibangun. Kedepannya, perlu dilakukan optimalisasi anggaran untuk pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan masyarakat adat pemilik ulayat sumber air untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang *win win solution* untuk pemanfaatan sumber air baku tersebut. Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan lainnya adalah, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mengelola dan memelihara fasilitas air minum yang telah dibangun.

Capaian Indikator persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 82,56 persen. Melampaui target 40,72 persen yang ditentukan di Dokumen RPJMD. Kenaikan capaian yang sangat signifikan ini merupakan hasil sinkronisasi data rumah tangga bersanitasi layak dengan data yang terdapat pada Dinas Kesehatan. Walaupun pencapaian target ini merupakan catatan keberhasilan, tetapi sisi lain dari permasalahan sanitasi layak ini masih menyisakan permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah domestik yang aman dan layak. Untuk mencapai target persentase rumah tangga bersanitasi layak membutuhkan optimalisasi penganggaran untuk sanitasi layak ini. Dibutuhkan upaya-upaya tertentu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak dengan melibatkan semua pihak terkait.

Hingga tahun 2024 yang dihasilkan dokumen rencana rinci yang dihasilkan adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni juga belum mencapai target yang diharapkan. Belum optimalnya penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni merupakan faktor utama penyebab indikator ini belum mencapai target. Perlu diakui, bahwa optimalisasi pendanaan rumah layak huni akan sulit untuk dilaksanakan mengingat kebutuhan dana yang besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBD Kabupaten Belu. Selain itu, data yang tersedia pada Dinas PUPR merupakan data yang belum *diupdate*. Data cakupan ketersediaan rumah layak huni ini digunakan Dinas PUPR saat ini merupakan data tahun 2021.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sat	Target 2024	Baseline (2021)	Realisasi	
							2023	2024
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	%	66,23	60,60	69,99	40,32
		2	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	35,48	30,20	32,40	34,20
		3	Rumah tangga bersanitasi layak	%	40,72	37,89	39,16	80,86
		4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	69,33	68,78	64,71	64,82
		5	Rasio jaringan irigasi	%	20,52	16,15	30,99	28,42
		6	Jumlah dokumen rencana rinci yang sah	%	28,57	0	14,29	14,29

Tahun pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah 2021-2026, oleh karena itu, pengukuran realisasi kinerja sasaran ini mulai dihitung Tahun 2022. Adapun, pada kolom *baseline* tersebut merupakan kondisi awal pada tahun 2021. Sedangkan kolom capaian merupakan perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2023.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan signifikan yang disebabkan oleh adanya pergantian ruas jalan sebagaimana terdapat Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 16/600.1/PUPR/V/2024 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Belu. Surat keputusan tersebut menggantikan surat keputusan sebelumnya dan menggantikan beberapa ruas jalan. Perhitungan capaian persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2024 mengacu pada surat keputusan terbaru, sehingga capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 menurun drastis.

Capaian Rumah tangga dengan akses terhadap air minum Tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Konsistensi alokasi DAK Bidang Air Minum merupakan merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan capaian indikator ini.

Peningkatan capaian yang signifikan berhasil dicapai pada akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Signifikansi naiknya capaian indikator ini disebabkan oleh perpaduan data Dinas PUPR dengan Dinas Kesehatan, dimana hal ini tidak dilakukan pada Tahun 2023.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2024 berjalan di tempat karena pendataan yang tidak dilakukan. Pendataan terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021.

Ratio jaringan irigasi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh adanya bencana yang merusak beberapa jaringan irigasi pada musim penghujan tahun 2024.

Tidak terdapat dokumen rencana rinci yang diterbitkan pada tahun 2023, sehingga tidak ada peningkatan capaian indikator ini.

3. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Rencana Strategis)

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Berada dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 2021-2026

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sat.	Target 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	%	66,23	40,32	110,39
		2	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	35,48	34,20	97,92
		3	Rumah tangga bersanitasi layak	%	40,72	80,86	104,47
		4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	69,14	64,71	99,48
		5	Rasio jaringan irigasi	%	19,30	30,97	160,47
		6	Jumlah dokumen rencana rinci yang sah	%	14,29	14,29	100,00

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) yang ditargetkan 63,40% pada tahun 2024 mampu direalisasikan 40,32%. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh adanya pergantian ruas jalan sebagaimana terdapat Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 16/600.1/PUPR/V/2024 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Belu. Dengan adanya pergantian ruas-ruas jalan tersebut, kondisi jalan yang terdapat SK dimaksud mempengaruhi capaian indikator ini.

Capaian Rasio jaringan irigasi pada tahun adalah 28,42%. Melampaui target yang ditetapkan; 20,52%. Konsistensi dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi merupakan penentu utama dalam capaian ini. Pada tahun 2024, DAK Bidang Irigasi Kabupaten Belu adalah Rp3.510.000.000 (*Tiga Miliard Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah*). Hingga tahun 2024, panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik di Kabupaten Belu adalah 25.206,30 Meter.

Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak belum mencapai target yang diharapkan. Target 35,48% yang direncanakan hanya dapat dicapai pada angka 34,20 persen. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya akses rumah tangga terhadap air minum layak ini antara lain; belum optimalnya penganggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, ketersediaan air baku yang terbatas karena keadaan geografi dan topografi, mayoritas keberadaan air baku berstatus milik masyarakat adat bukan milik pemerintah, belum adanya lembaga pengelola air bersih non BUMD (kelompok masyarakat) yang handal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas air minum umum yang telah dibangun. Kedepannya, perlu dilakukan optimalisasi anggaran untuk pemenuhan akses rumah tangga terhadap air minum. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan masyarakat adat pemilik ulayat sumber air untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang *win win solution* untuk pemanfaatan sumber air baku tersebut. Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan lainnya adalah, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mengelola dan memelihara fasilitas air minum yang telah dibangun.

Capaian Indikator persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 80,86 persen. Melampaui target 40,72 persen yang ditentukan di Dokumen RPJMD. Kenaikan capaian yang sangat signifikan ini disebabkan oleh sinkronisasi data rumah tangga bersanitasi layak dengan data yang ada pada Dinas Kesehatan. Walaupun pencapaian target ini merupakan catatan keberhasilan, tetapi sisi lain dari permasalahan sanitasi layak ini masih menyisakan permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah domestik yang aman dan layak. Masih sangat dibutuhkan upaya-upaya tertentu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak dengan melibatkan semua pihak terkait.

Hingga tahun 2024 dokumen rencana rinci yang dihasilkan adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni juga belum mencapai target yang diharapkan. Belum optimalnya penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni merupakan faktor utama penyebab indikator ini belum mencapai target. Perlu diakui, bahwa optimalisasi pendanaan rumah layak huni akan sulit untuk dilaksanakan mengingat kebutuhan dana yang besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBD Kabupaten Belu. Selain itu, data yang tersedia pada Dinas PUPR merupakan data yang belum diupdate. Data cakupan ketersediaan rumah layak huni ini digunakan Dinas PUPR saat ini merupakan data tahun 2021.

4. Realisasi Kinerja Berdasarkan Standar Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja	Sat.	Capaian Nasional	Realisasi	Keterangan
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	%	n/a	40,32	
2.	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	n/a	39,24	
3.	Rumah tangga bersanitasi layak	%	n/a	82,57	
4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	n/a	64,82	
5.	Rasio jaringan irigasi	%	n/a	28,42	
6.	Jumlah dokumen rencana rinci yang sah	%	n/a	14,29	

Hingga saat pembuatan laporan ini, kami belum mendapatkan sumber resmi terkait capaian nasional atas indikator-indikator kinerja ini.

5. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Predikat/ Angka	CC/54	B/60,54	-
	~ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dok	21,00	24,00	114,29

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	21,00	24,00	114,29
	~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Pkt	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	996,00	996,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penataanusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pkt	12,00	12,00	100,00
	~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pkt	16,00	16,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkt	4,00	4,00	100,00
	~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit per tahun	47,00	47,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit per tahun	42,00	42,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit per tahun	5,00	5,00	100,00
	~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Lap	36,00	36,00	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12,00	12,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	%	20,52	28,42	138,50

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	~ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun dan Ditingkatkan	Jaringan	5,00	5,00	100,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	M	1.742,00	1.742,00	100,00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	M	1.210,00	2.989,00	247,02
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang operasi dan pemeliharaan	M	200,00	200,00	100,00
	~ Pengelolaan SDA Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai dalam Kab. Belu	Unit	7,00	7,00	100,00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yangdisusun	Dok	3,00	1,00	33,33
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun	Titik	4,00	3,00	75,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Keluarga dengan Akses Perpipaan Air minum Layak	%	35,48	34,20	98,37
	~ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Paket	6,00	6,00	100,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	11,00	11,00	100,00
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	260,00	260,00	100,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dibangun	SR	80,00	80,00	100,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	500,00	500,00	100,00
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pkt	1,00	1,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	625,00	625,00	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	40,72	80,86	198,57
	- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Paket	17,00	12,00	70,59
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tanki Septic	RT	966,00	966,00	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	66,23	40,32	60,88
	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Jalan Kabupaten yang diselenggarakan	Pkt	15,00	15,00	100,00
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	5,00	29,00	580,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	3,00	3,00	100,00
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang dilaksanakan	unit	50,00	-	-
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Laporan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Lap	12,00		-
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun	Kali	4,00		-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Keketersediaan Rumah Layak Huni	%	69,33	64,82	93,49
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	-	-	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	Unit	-	-	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun	Unit	-	-	
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Keketersediaan Rumah Layak Huni	%	69,33	64,82	93,49

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang Dilaksanakan	Kawasan	-	-	-
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	-		-
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	Unit	-	-	-
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan	%	40,00	40,00	100,00
	- Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persil	5,00	5,00	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Kali	5,00	5,00	100,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	%	27,56	-	-
	- Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Bidang	1,00	1,00	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Lap	1,00	1,00	100,00

6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi		Capaian (%)
				2023	2024	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Predikat/ Angka	CC/52,27	B/60,54	-
	~ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dok	24,00	24,00	114,29
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	24,00	24,00	114,29
	~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Pkt	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	996,00	996,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Capaian
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pkt	12,00	12,00	100,00
	~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pkt	16,00	16,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkt	4,00	4,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkt	4,00	4,00	100,00
	~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit per tahun	47,00	47,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit per tahun	42,00	42,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit per tahun	5,00	5,00	100,00
	~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Lap	36,00	36,00	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12,00	12,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12,00	12,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	%	30,97	28,42	
	~ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun dan Ditingkatkan	Jaringan	5,00	5,00	100,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	M	1.742,00	1.742,00	100,00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	M	2.989,00	2.989,00	247,02
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang operasi dan pemeliharaan	M	200,00	200,00	100,00
	~ Pengelolaan SDA Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai dalam Kab. Belu	Unit	7,00	7,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Capaian
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang disusun	Dok	1,00	1,00	33,33
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun	Titik	3,00	3,00	75,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Keluarga dengan Akses Perpipaan Air minum Layak	%	30,59	34,20	
	~ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Paket	6,00	6,00	100,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	11,00	11,00	100,00
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	260,00	260,00	100,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dibangun	SR	80,00	80,00	100,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	500,00	500,00	100,00
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pkt	1,00	1,00	100,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	625,00	625,00	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	41,56	80,86	104,47
	- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Paket	12,00	12,00	70,59
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tanki Septic	RT	966,00	966,00	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	63,40	40,32	60,88
	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Jalan Kabupaten yang diselenggarakan	Pkt	15,00	15,00	100,00
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	29,00	29,00	580,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	3,00	3,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Capaian
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang dilaksanakan	unit	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Laporan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Lap			-
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun	Kali			-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Kekersediaan Rumah Layak Huni	%	64,71	64,82	
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang Dilaksanakan	Kawasan	-		-
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit			-
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	Unit	-		-
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan	%	40		100,00
	- Peyeleasaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peyeleasaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persil	3,00		60,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Kali	5,00		100,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	%	27,56		-
	- Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Bidang	1,00		100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Lap	1,00		100,00

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

Dengan berlakunya SK Bupati Belu Nomor 16/600.1/PUPR/V/2024 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Belu menggantikan SK Bupati Belu Nomor PUPR.600/13I/2019 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Belu, terdapat pergantian beberapa ruas jalan yang pada akhirnya juga mengubah capaian indikator ini.

2. Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak,

Akses terhadap air minum layak yang dimaksud di sini adalah, penyediaan air minum yang diperoleh dari sistem penyediaan air minum perpipaan. Capaian indikator rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Belu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, jumlah rumah tangga di Kabupaten Belu per 31 Desember 2024 adalah 63.266 RT. Jumlah KK yang terlayani air minum layak sampai Bulan Desember 2023 sebesar 21.621 KK. Pada tahun 2024, target yang ditentukan untuk indikator ini adalah sebesar 35,48 %, sedangkan realisasi capaian sebesar 34,90% . Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab masih rendahnya KK yang mempunyai akses terhadap air minum layak;

1. Belum optimalnya penganggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Ketersediaan air baku yang terbatas dikarenakan kondisi geografi dan topografi;
3. Mayoritas keberadaan air baku berstatus milik masyarakat adat bukan milik pemerintah;
4. Belum adanya lembaga pengelola air bersih non BUMD (kelompok masyarakat) yang handal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas air minum umum yang telah dibangun.

Optimalisasi pendanaan untuk air minum akan sulit untuk dilaksanakan mengingat kebutuhan dana yang besar, sedangkan ketersediaan dana sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu

dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBD Kabupaten Belu. Untuk keperluan pencarian sumber pendanaan selain APBD tersebut, maka diperlukan penyiapan *readiness criteria* tertentu sesuai permintaan pemilik dana. Penyediaan air baku untuk air minum masyarakat di daerah-daerah dengan kondisi geografi dan topografi yang sulit juga perlu dicari teknologi alternatif lain yang sesuai dengan keadaan geografi dan topografi wilayah tersebut. Pembangunan sumur bor juga dapat menjawab permasalahan ini, tetapi perlu kajian yang baik. Komunikasi yang baik juga perlu dilakukan bagi masyarakat-masyarakat adat yang memiliki sumber air, agar eksploitasi air baku tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, dibutuhkan pembinaan bagi masyarakat dari aspek penguatan kelembagaan untuk melakukan pengelolaan terhadap sarana air minum yang telah dibangun di lokasi tersebut. Penguatan kelembagaan ini juga diperlukan untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan membangun peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi terkait pemeliharaan sarana-prasarana yang telah dibangun.

3. Rumah tangga bersanitasi layak

Yang dimaksud sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Capaian indikator rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Belu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, jumlah rumah tangga di Kabupaten Belu per 31 Desember 2024 adalah 63.266 RT. Jumlah KK yang berakses sanitasi layak sampai Bulan Desember 2024 sebesar 51.155 KK. Pada tahun 2024, target yang ditentukan untuk indikator ini adalah sebesar 40,72%, sedangkan realisasi capaian sebesar 82,57%.

4. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Rumusan cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Belu pada tahun 2024. Adapun pendataan terakhir terhadap rumah layak huni dilakukan pada Tahun 2021, dimana jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu adalah 22.847 Unit, sedangkan jumlah rumah layak huni adalah 35.305 Unit. Target yang yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 69,33% sedangkan capaian indikator ini stagnan pada angka 64,71%. Belum optimalnya penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni merupakan faktor utama penyebab indikator ini belum mencapai target. Perlu diakui, bahwa optimalisasi pendanaan rumah layak huni akan sulit untuk dilaksanakan mengingat kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBD Kabupaten Belu. Untuk keperluan pencarian sumber pendanaan selain APBD tersebut, maka diperlukan penyiapan *readiness criteria* tertentu sesuai permintaan pemilik dana.

5. Rasio jaringan irigasi

Rumusan indikator ini adalah perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Belu. Berdasarkan data dari Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Belu, panjang saluran irigasi dalam kondisi baik adalah 25.206,30 M, sedangkan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten adalah 886,95 Ha. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 28,42%, melampaui target yang ditentukan yaitu 20,52%.

6. Persentase dokumen rencana rinci yang sah

Saat ini kabupaten Belu telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 202-2040. Untuk operasionalisasi RTRW tersebut diperlukan penjabaran dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan rencana rinci tata ruang. Terdapat 14 (empat belas) dokumen rencana rinci yang seharusnya tersedia, namun dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, direncanakan

untuk menghasilkan 6 (enam) dokumen rencana rinci yang sah atau 42,86 persen. Rencana Target tahun 2023 adalah 14,29%. Adapun formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah Jumlah dokumen rencana rinci yang dihasilkan pada tahun n dibagi jumlah keseluruhan dokumen rencana rinci yang dibutuhkan dikalikan seratus persen.

Pada tahun 2023 dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka target capaian dari indikator ini adalah 14,26 persen dan pencapaian target ini adalah 100 persen. Pada tahun 2024 tidak terdapat dokumen rencana rinci yang dihasilkan, sehingga tidak terdapat perubahan realisasi capaian indikator ini.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja berikut ini diuraikan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu Tahun 2023.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	7.550.538.849	6.971.699.817	92,33
	1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.450.000	10.440.000	99,90
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.994.000	99,88
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.450.000	5.446.000	99,93
	2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.490.697.149	5.944.632.378	91,59
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.089.047.149	5.542.982.378	91,03
	- Pelaksanaan Penataanusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	401.650.000	401.650.000	100,00
	3 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	265.356.500	258.586.350	97,45
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.480.000	3.480.000	100,00

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000		
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.741.500	6.741.500	100,00
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.999.850	100,00
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	4.971.500	99,43
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	237.435.000	237.435.000	100,00
4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.895.000	52.633.637	95,88
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00
	- Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	52.395.000	50.133.637	95,68
5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	729.140.200	705.407.452	96,75
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	582.234.600	564.626.522	96,98
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	146.905.600	140.780.930	95,83
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.815.974.602	4.791.431.772	99,49
1	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	656.681.800	652.604.800	99,38
	- Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	60.042.000	56.042.000	93,34
	- Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000	10.000.000	71,43
	- Belanja Barang Jasa	46.042.000	46.042.000	100,00
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000	199.923.000	99,96
	- Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	396.639.800	396.639.800	100,00
2	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 100 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.159.292.802	4.138.826.972	99,51
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.188.357.000	2.178.944.400	99,57

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.326.649.402	1.320.641.802	99,55
	- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	290.836.400	286.973.770	98,67
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	353.450.000	352.267.000	99,67
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.694.077.442	15.027.215.877	95,75
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.694.077.442	15.027.215.877	95,75
	- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	25.950.000	25.950.000	100,00
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	557.298.000	550.810.000	98,84
	- Pemb. SPAM jaringan Perpipaan	12.420.289.642	11.824.621.377	95,20
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	2.690.539.800	2.651.784.500	98,56
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	201.909.000	201.750.000	99,92
	1 KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.909.000	201.750.000	99,92
	- Penyediaan sarana Pendukung TPA/TPST/TPS-3R/TPS	201.909.000	201.750.000	99,92
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86
	- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20.000.000	20.000.000	100,00
	- Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.354.138.962	8.342.576.212	99,86
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.000.000	99.949.000	99,95
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB./KOTA	100.000.000	99.949.000	99,95
	- Rehabilitasi Sisten Drainase Perkotaan	100.000.000	99.949.000	99,95

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79.640.000	76.359.928	95,88
	1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KAB./KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	79.640.000	76.359.928	95,88
	- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kab./Kota	29.640.000	29.640.000	100,00
	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50.000.000	46.719.928	93,44
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.538.539.760	59.297.001.990	98,46
	1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	60.538.539.760	59.297.001.990	98,46
	- Pembangunan Jalan	56.985.571.500	56.663.597.674	99,43
	- Rehabilitasi Jalan	2.642.071.510	2.633.404.316	99,67
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	723.885.000	339.201.260	99,77
	1 KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA / RELOKASI PROGRAM KABUPATEN / KOTA	723.885.000	339.201.260	46,86
	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	340.125.000	339.201.260	99,73
	- Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	383.760.000	347.123.598	90,45
10	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	468.100.000	-	0,00
	1 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS WILAYAH DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha	468.100.000	-	0,00
	- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	468.100.000	-	0,00
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	325.750.000	75.009.000	23,03
	1 KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH	75.750.000	75.009.000	100,00

NO	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.750.000	75.009.000	100,00
12	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	25.000.000	24.803.000	99,21
	1 KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG	25.000.000	24.803.000	99,21
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian tanah Kosong di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	1.200.000	99,21

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, rata rata realisasi keuangan adalah 96,72%. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Belu, per 31 Desember 2024 realisasi keuangan adalah Rp95.650.012.554,- (*Sembilan Puluh Lima Miliard Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) dari total alokasi anggaran Rp98.887.553.615 (*Sembilan Puluh Delapan Miliard Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*). Terdapat selisih sebesar Rp3.247.541.061 (*Tiga Miliard Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah*)

Kesenjangan antara alokasi realisasi anggaran tersebut paling banyak disumbangkan oleh Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp1.241.537.770 (*Satu Miliard Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*). Hal ini terjadi karena bagian terbesar dari belanja pada program ini merupakan belanja yang dilelangkan bagi pihak ketiga.

Penyumbang kesenjangan realisasi terbanyak selanjutnya ada pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu Rp666.861.565 (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*). Hal ini terjadi karena adanya nilai sisa lelang, dimana bagian terbesar dari belanja pada program ini merupakan belanja yang dilelangkan bagi pihak ketiga.

Selanjutnya terdapat Program Kawasan Permukiman, dimana terdapat Rp468.100.000 yang dianggarkan pada saat Perubahan APBD. Anggaran tersebut merupakan SILPA DAK dari tahun-tahun sebelumnya. Juknis penggunaan SILPA DAK yang tidak tersedia merupakan penyebab anggaran ini tidak dapat digunakan.

Selanjutnya Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan menyumbang selisih sebesar Rp250.741.000, yang tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terlaksananya pembebasan lahan untuk Reservoir Raimaten. Belum selesainya masalah sertifikat kepemilikan tanah dimaksud menyebabkan kegiatan ini belum dapat direalisasikan.

Selisih selanjutnya berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan senilai Rp 578.839.032, dimana penyumbang selisih terbesar adalah Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp546.064.771.

Dari uraian di atas, secara garis besar dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu:

1. Belum ada optimalisasi penggunaan dana sisa lelang;
2. Masih terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat kurang matangnya perencanaan kegiatan;
3. Terdapat dana SILPA yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan .

Untuk tahun selanjutnya, belajar dari permasalahan tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Pelaksanaan lelang seharusnya dapat dilakukan lebih awal agar optimalisasi anggaran sisa lelang dapat dipergunakan;
2. Perlu kajian yang lebih baik atas perencanaan kegiatan yang akan dilakukan agar pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dialokasikan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan usulan penggunaan dana SILPA pada Dokumen Pelaksanaan anggaran tahun berjalan agar dana SILPA tersebut dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Secara umum capaian sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu pada tahun 2023 sangat baik. Dari 6 (enam) indikator yang ada, terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target, rasio jaringan irigasi dan rumah tangga bersanitasi layak. Capaian kinerja persentase dokumen rencana rinci yang sah juga mencapai 100 persen, dengan disahkannya 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja untuk Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Minum Layak juga berada pada 97,92 persen, dimana target 33,72 persen dapat dicapai hingga 33,02 persen.

Capaian kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni masih meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah kabupaten Belu, mengingat gap antara target 69,14 persen yang baru dicapai pada 64,71 persen.

1.2 Langkah Peningkatan Kinerja Organisasi

Dari simpulan capaian kinerja diatas, langkah peningkatan kinerja organisasi yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penganggaran untuk program-program prioritas untuk mengejar ketertinggalan target kinerja yang telah direncanakan;
2. Proaktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi NTT dan Pemerintah Pusat agar Kabupaten Belu dapat menjadi lokus utama program-program pembangunan terutama yang mendukung capaian kinerja yang telah ditentukan;
3. Menyiapkan readiness criteria yang ditentukan untuk mendapatkan sumber pendanaan program prioritas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. Membangun kesadaran masyarakat terkait pelestarian fasilitas umum yang telah dibangun;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur sesuai tugas dan fungsinya, agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara lebih baik lagi;
6. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Atambua, 09 Januari 2025,

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu,



S. VINSEN DALUNG, ST

NIP. 19760820 200112 1 006